Nama : Farhansyah Putra

Kelas : Reguler D

NPM : 2416041128

BAB II Kuantitatif

**BAB II**
**TINJAUAN PUSTAKA**

 **2.1 Konsep Birokrasi dan Reformasi Birokrasi**Birokrasi merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Secara konseptual, Max Weber memandang birokrasi sebagai sistem organisasi rasional-legal yang dibangun atas prinsip hierarki kewenangan, aturan tertulis, spesialisasi kerja, dan profesionalisme aparatur. Dalam kerangka Weberian, birokrasi idealnya mampu menghadirkan keteraturan, stabilitas, serta efisiensi yang tinggi. Namun, idealisasi tersebut seringkali berbeda dengan realitas di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, birokrasi justru kerap diidentikkan dengan ketidakmampuan melayani masyarakat secara cepat, prosedur berbelit, serta kultur kerja yang kaku. Kritik terhadap birokrasi Indonesia sudah lama muncul, baik dari kalangan akademisi, media, maupun masyarakat luas. Fenomena “prosedur panjang dan lambat” menjadi wajah dominan birokrasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah cenderung rendah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia sejak era Reformasi 1998 menginisiasi agenda reformasi birokrasi nasional. Salah satu tonggak utamanya adalah penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang menargetkan terwujudnya birokrasi kelas dunia. Reformasi tersebut meliputi penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, hingga pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, transformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural, tetapi juga kultural.

**2.2 Paradigma Administrasi Publik dan Digitalisasi**
Studi administrasi publik menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari masa ke masa. Paradigma administrasi publik tradisional menempatkan birokrasi sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum, menjaga keteraturan, dan menjalankan perintah hierarkis. Paradigma ini menekankan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi cenderung kaku dan kurang responsif terhadap perubahan sosial.

Seiring perkembangan, muncul paradigma New Public Management (NPM) yang terinspirasi oleh sektor swasta. NPM mendorong efisiensi, efektivitas, orientasi hasil, dan kompetisi dalam sektor publik. Digitalisasi birokrasi, dalam kerangka New Public Manajemen, dipandang sebagai cara memangkas inefisiensi, mempercepat layanan publik, dan menurunkan biaya operasional.
Namun, paradigma ini tidak lepas dari kritik. Kehadiran New Public Service (NPS) oleh Denhardt and Denhardt (2015) mengingatkan bahwa birokrasi bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga pelayanan publik yang humanis, partisipatif, dan demokratis. Dalam kerangka New Public Service, digitalisasi tidak boleh semata-mata menjadi proyek teknis, melainkan instrumen untuk memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi.

Oleh karena itu, transformasi birokrasi digital di Indonesia perlu dilihat sebagai kombinasi nilai New Public Manajemen (efisiensi) dan New Public Service (pelayanan berorientasi masyarakat). Digitalisasi bukan hanya soal “aplikasi layanan”, melainkan tentang bagaimana birokrasi mampu mengubah kultur kerja, meningkatkan integritas, dan menciptakan ruang partisipasi warga yang lebih luas.

**2.3 Indikator Kuantitatif Birokrasi: SPBE, IRB, dan IPK**
Dalam menilai kemajuan reformasi birokrasi, terdapat tiga indikator utama yang relevan:
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) – mengukur sejauh mana layanan publik dan manajemen pemerintahan sudah terdigitalisasi, terintegrasi, dan inklusif.
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) – menilai efektivitas reformasi birokrasi di Indonesia berdasarkan kriteria kelembagaan, akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas SDM.
3. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) – mengukur tingkat korupsi dalam birokrasi dari perspektif domestik maupun internasional.

Ketiga indikator ini saling terkait. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang kuat meningkatkan efisiensi, mendorong naiknya Indeks Reformasi Birokrasi, dan pada akhirnya mempersempit ruang korupsi sehingga memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi. Namun, jika salah satu indikator stagnan, maka reformasi birokrasi akan terhambat.

**2.4 Tabel Perbandingan SPBE, IRB, dan IPK**

**Negara/Daerah SPBE (2022) IRB (2022) IPK (2022)**

Indonesia (Nasional) 35% pemda kategori baik, 65% cukup/kurang 70,88 (B) 34

Pemerintah Daerah (514) 180 daerah baik, 334 cukup/kurang. Mayoritas “cukup” -

SSingapur ± 90% layanan publik digital terintegrasi 85+ (A) 83

Korea Selatan ± 85% layanan publik digital terintegrasi 80+ (A-) 63

Estonia ± 99% layanan publik digital (hampir total) 85+ (A) 74

**2.5 Analisis Esai atas Data Kuantitatif**a) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indonesia
Indonesia baru menempatkan 35% pemda pada kategori baik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sementara 65% sisanya masih berada pada kategori cukup dan kurang. Dari total 514 pemda, ini berarti hanya 180 daerah yang relatif siap dengan digitalisasi, sementara 334 daerah lainnya belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan digital antarwilayah yang sangat tajam. Wilayah perkotaan di Jawa, Bali, dan Sumatera relatif lebih siap dibandingkan dengan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Perbandingan dengan Estonia yang berhasil menerapkan 99% layanan publik secara digital memperlihatkan gap yang besar. Estonia bahkan mampu melaksanakan pemilu secara online dengan tingkat partisipasi tinggi. Singapura dengan 90% layanan publik digital terintegrasi menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan smart nation. Korea Selatan juga berhasil mencapai 85% integrasi layanan publik digital.Dengan demikian, secara kuantitatif Indonesia masih tertinggal lebih dari 50 poin persentase dibandingkan Estonia dan sekitar 55 poin persentase dibandingkan Singapura dalam hal digitalisasi birokrasi.

b) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
IRB Indonesia pada 2022 berada di angka 70,88 atau kategori B. Target yang dicanangkan pemerintah adalah mencapai kategori A (≥85) pada 2025. Namun, dengan laju kenaikan rata-rata hanya 1,5–2 poin per tahun, maka target ini tampaknya sulit tercapai. Jika tren saat ini berlanjut, kategori A baru akan diraih sekitar 2030. Artinya, Indonesia mengalami keterlambatan sekitar 5 tahun dari target Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sebaliknya, negara seperti Singapura, Estonia, dan Korea Selatan sudah berada di kategori A atau mendekatinya. Hal ini menandakan bahwa birokrasi mereka sudah matang dalam aspek struktur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

c) Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 hanya berada di angka 34, menempatkan Indonesia di posisi 110 dari 180 negara. Angka ini jauh di bawah rata-rata global (43) dan sangat tertinggal dibandingkan Singapura (83), Estonia (74), maupun Korea Selatan (63).Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi Indonesia belum sepenuhnya berhasil menekan praktik korupsi. Meski aplikasi digital sudah banyak diluncurkan, implementasi di lapangan masih lemah, integritas aparatur masih rendah, dan transparansi belum sepenuhnya diinternalisasi.

**2.6 Hubungan Antar Indikator: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik–Indeks Reformasi Birokrasi–Indeks Persepsi Korupsi**
Ketiga indikator saling berkorelasi erat. Negara atau daerah yang memiliki Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tinggi cenderung memiliki Indeks Reformasi Birokrasi lebih baik, dan keduanya pada gilirannya mendorong Indeks Persepsi Korupsi lebih tinggi karena ruang korupsi semakin sempit. Estonia menjadi contoh nyata: hampir semua layanan publik digital (SPBE 99%), Indeks Reformasi Birokrasi kategori A, dan Indeks Persepsi Korupsi 74.Sebaliknya, Indonesia menghadapi fenomena “disconnect”. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih rendah dan timpang antarwilayah, Indeks Reformasi Birokrasi stagnan di kategori B, sementara Indeks Persepsi Korupsi rendah. Dengan demikian, digitalisasi di Indonesia belum berjalan sebagai satu kesatuan sistem, melainkan parsial dan sektoral.

**2.7 Implikasi untuk Transformasi Birokrasi Indonesia**Perbandingan kuantitatif ini memiliki implikasi strategis yang penting. Pertama, digitalisasi birokrasi harus dipercepat dan dipastikan merata di seluruh wilayah. Tanpa pemerataan infrastruktur digital, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik hanya akan dinikmati daerah perkotaan, sementara daerah pedesaan dan 3T tetap tertinggal.Kedua, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi tidak cukup dengan kebijakan normatif. Reformasi birokrasi harus menyentuh aspek budaya organisasi, memperkuat integritas, dan mendorong inovasi di tingkat lokal.Ketiga, rendahnya Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta mengurangi korupsi. Diperlukan pengawasan yang lebih kuat, penerapan sistem transparansi berbasis data, serta insentif untuk mendorong aparatur agar menjunjung akuntabilitas.

**2.8 Relevansi dengan Visi Indonesia Emas 2045**
Visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju tepat pada 100 tahun kemerdekaan. Visi ini tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, transformasi birokrasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

1. SPBE dan Pemerataan Akses Digital
Indonesia Emas 2045 mensyaratkan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun wilayah terpencil, harus memiliki akses yang setara terhadap layanan publik. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 masih terdapat 12.548 desa (16,7%) yang belum memiliki akses internet memadai. Jika kesenjangan digital ini tidak segera diatasi, maka birokrasi digital hanya akan dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara daerah tertinggal akan semakin terpinggirkan.

Oleh karena itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak boleh sekadar berfokus pada peningkatan jumlah aplikasi atau sistem digital, tetapi juga harus memastikan pemerataan akses internet, ketersediaan perangkat, serta literasi digital di seluruh daerah. Target minimal adalah 80–90% pemda kategori baik dalam SPBE sebelum 2045, agar digitalisasi birokrasi tidak menjadi sumber baru kesenjangan sosial.

2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebagai Fondasi Tata Kelola
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi nasional Indonesia pada 2022 baru mencapai 70,88 (kategori B), dengan target kategori A (≥85) pada 2025. Namun, laju kenaikan hanya sekitar 1,5–2 poin per tahun. Jika tren ini berlanjut, kategori A baru akan tercapai sekitar tahun 2030–2032, terlambat dari target semula. Keterlambatan ini berpotensi mengganggu pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sebab, birokrasi adalah aktor utama dalam implementasi kebijakan publik. Jika birokrasi masih kaku, hierarkis, dan lamban, maka kebijakan pembangunan termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital akan terhambat. Dengan demikian, percepatan reformasi birokrasi menjadi keharusan, baik melalui restrukturisasi kelembagaan, penguatan akuntabilitas, maupun peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur.

3. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Integritas Birokrasi
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 berada di angka 34/100, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Skor ini jauh di bawah rata-rata global (43) dan sangat tertinggal dibandingkan negara-negara yang sudah lebih dulu sukses dalam transformasi birokrasi digital seperti Singapura (83), Estonia (74), dan Korea Selatan (63).Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa digitalisasi di Indonesia belum mampu menekan praktik korupsi secara signifikan. Padahal, integritas birokrasi adalah salah satu syarat utama untuk mencapai pemerintahan yang bersih, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Apabila Indeks Persepsi Korupsi tidak naik secara signifikan (minimal >50) sebelum 2045, maka Indonesia akan sulit menarik investasi asing, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Hubungan Tiga Indikator (SPBE–IRB–IPK) dengan Indonesia Emas 2045
Ketiga indikator ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tanpa perbaikan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Persepsi Korupsi hanya akan menghasilkan digitalisasi parsial yang rentan menjadi proyek seremonial. Indeks Reformasi Birokrasi tanpa penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan terjebak dalam reformasi struktural yang lamban dan tidak inovatif. Indeks Persepsi Korupsi yang rendah akan terus menjadi ancaman meskipun ada kemajuan digitalisasi, karena korupsi mampu memanfaatkan celah dalam sistem digital sekalipun. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia mencapai Visi 2045 sangat ditentukan oleh sinergi antara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Persepsi Korupsi. Digitalisasi birokrasi harus dibarengi dengan perubahan budaya organisasi, penguatan integritas, dan konsistensi penegakan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: Routledge.

Kettunen, P., & Kallio, J. (2020). Digital Transformation of Public Administration: Case Studies and Comparative Perspectives. London: Palgrave MacmiIlan. ndrajit, R. E. (2020). “Digital Government Transformation in Indonesia: Challenges and Opportunities.” Journal of Public Administration Studies, 5(2), 45–60.

Nugroho, Y. (2019). “Bureaucratic Reform in Indonesia: Between Policy and Practice.” Asian Journal of Public Administration, 41(1), 67–85.

Pratama, A., & Purwanto, E. (2021). “The Role of Organizational Culture in E-Government Implementation in Local Governments.” Journal of Governance and Public Policy, 8(1), 32–47.

Lee, J., & Kim, S. (2018). “E-Government and Public Sector Innovation: International Evidence and Lessons for Developing Countries.” Government Information Quarterly, 35(4), 643–651.